



SIARAN PERS

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan. Prof. Moh. Yamin No.84 Palu Sulawesi Tengah 94121

Telepon 0451-486622 Faksimili 0451-486633

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH MENYERAHKAN LHP PEMERIKSAAN KINERJA DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) PADA 12 (DUABELAS) PEMERINTAH DAERAH.

Palu, Senin, 13 Januari 2020 – Sesuai pasal 4 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004, BPK melaksanakan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang terdiri atas Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Maka pada hari ini, Senin, 13 Januari 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan PDTT kepada 12 entitas. yaitu:

1. Kinerja Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Laut;
2. Kinerja atas efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Morowali Utara;
3. Kinerja atas efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tolitoli;
4. PDTT atas belanja daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Tojo Una-Una;
5. PDTT atas operasional PDAM Kabupaten Banggai Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan;
6. PDTT atas Pendapatan Asli Daerah TA 2018 dan TA 2019 (s.d. 31 Oktober) pada Kota Palu.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dapat menghambat upaya Pemerintah Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Laut dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun beberapa hal sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Buol dan Banggai Laut belum menjalankan Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan Data dan Informasi yang Valid;
2. Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan belum menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai Acuan Perbaikan Mutu Pembelajaran;
3. Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan belum menerapkan Pembelajaran sesuai Kurikulum 2013;

Dengan mempertimbangkan beberapa upaya dan keberhasilan yang telah dicapai serta permasalahan yang ditemukan dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 diperoleh kesimpulan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Buol dan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut *tidak efektif* dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019.

Selanjutnya, **Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Morowali Utara** bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019.

Dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif/capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Morowali Utara, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain yaitu :

1. Terkait pengelolaan dana kapitasi, Rencana Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar sudah memperhitungkan skala prioritas namun belum mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya;
2. Terkait pengelolaan DAK Bidang Kesehatan, Pemanfaatan DAK Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan 2019 belum sesuai rencana jadwal pemanfaatan;
3. Terkait pengelolaan *dropping* barang dari APBN dan APBD Provinsi serta penempatan tenaga kesehatan, pemanfaatan barang *dropping* dan/atau tenaga kesehatan dari APBN dan/atau APBD Provinsi belum tepat sasaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Morowali Utara ***Kurang Efektif*** dalam mengelola dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019, sedangkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ***Cukup Efektif***.

Selanjutnya, **Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Donggala dan Tolitoli** bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas program dan kegiatan pembangunan manusia pada Kabupaten Tolitoli sebagai berikut :

1. Realisasi dana alokasi khusus tidak sesuai dengan target pendapatan yang ditetapkan;
2. Pengukuran dan penilaian kinerja belum didukung indicator kinerja yang selaras dan terukur;

Sedangkan pada Kabupaten Donggala

1. Perencanaan indicator kinerja program pembangunan manusia sampai dengan penilaian capaian kinerja belum selaras;
2. Penyusunan anggaran kegiatan program belum mengacu kepada prediksi makro ekonomi dan prediksi fiskal serta belum berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tolitoli, maka permasalahan – permasalahan tersebut ***dapat memengaruhi*** efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia.

Pada pemeriksaan PDTT, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan belanja modal infrastruktur, pengendalian intern belum sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan secara memadai.

Hasil pemeriksaan BPK pada **Kabupaten Poso**, ditemukan sebagai berikut.

1. Kelebihan pembayaran atas biaya tenaga ahli dan biaya survey atas empat paket jasa konsultasi pada tiga OPD senilai Rp199.500.000,00;serta
2. Kelebihan pembayaran atas 16 paket pekerjaan tidak sesuai kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp433.976.087,13;

Hasil pemeriksaan BPK pada **Kabupaten Morowali**, ditemukan sebagai berikut.

1. Proses pengadaan belum sesuai ketentuan, peralatan kesehatan tidak memiliki izin edar sebesar Rp3.230.530.882,00, Keterlambatan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp111.145.320,00, dan Pemahalan harga pengadaan alat kesehatan rumah sakit pratama paku pada Dinas Kesehatan minimal sebesar Rp1.417.847.030,00;
2. Kekurangan volume pekerjaan pada 11 paket pekerjaan sebesar Rp929.554.037,95, Kesalahan perhitungan AHSP Pembangunan pengamanan pantai desa Pu'ungkoilo sebesar Rp27.670.995,44, dan Keterlambatan penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan dalam desa makarti belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp73.046.251,47,

Sedangkan, Hasil pemeriksaan BPK pada **Kabupaten Tojo Una-Una**, ditemukan sebagai berikut.

1. Kesalahan penganggaran atas belanja modal gedung dan bangunan pada dua OPD sebesar Rp1.058.626.000,00, Kekurangan volume pekerjaan pada lima OPD sebesar Rp413.808.777,76, dan Perencanaan pekerjaan timbunan Tanah dipadatkan pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Wakai Dinas Kesehatan tidak didukung dengan perhitungan yang akurat sebesar Rp273.554.597,81;dan
2. Kesalahan penganggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada Disparbud, Kekurangan volume pekerjaan pada tiga OPD sebesar Rp433.013.100,10, Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Disparbud belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp2.299.988,47 dan Perubahan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan pasar baru dan lapangandong pada Dinas PUPR belum sesuai ketentuan sebesar Rp2.677.383.662,00.

Selanjutnya, **Pemeriksaan DTT atas Operasional PDAM Kabupaten Banggai Tahun 2018 dan Tahun 2019 (Semester I 2019)** bertujuan untuk menguji, menilai, serta memberikan simpulan apakah PDAM Kabupaten Banggai telah mengelola operasional PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam aspek administrasi dan keuangan dan aspek teknik.

BPK menemukan hal-hal material terkait kepatuhan PDAM Kabupaten Banggai terhadap ketentuan yang mengatur kegiatan operasional PDAM dalam mencapai tujuannya, yakni :

1. PDAM Kabupaten Banggai tidak pernah menguji kualitas air baku dan air produksinya sehingga tidak diketahui kualitas air sesungguhnya yang didistribusikan ke pelanggan;
2. PDAM Banggai tidak memiliki mekanisme untuk memantau jumlah produksi dan tingkat kebocoran sehingga tidak diketahui secara pasti jumlah kehilangan air dan tingkat efisiensi sesungguhnya;
3. Pertanggungjawaban biaya umum dan administrasi tidak lengkap sebesar Rp2.997.420.792,00 pada tahun 2018 dan sebesar Rp1.073.785.749,00 pada tahun 2019 (s.d. Semester I).

Selanjutnya, **Pemeriksaan DTT atas Pendapatan Asli Daerah Kota Palu** bertujuan untuk menguji dan menilai apakah sistem pengendalian intern dalam pengelolaan PAD telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, serta apakah pengelolaan PAD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK menemukan kelemahan yang signifikan terkait sistem pengendalian intern yang berdampak pada ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan PAD Pemerintah Kota Palu Tahun 2018 dan 2019 (s.d. 31 Oktober 2019), yaitu :

1. Ketentuan turunan atas amanat Perda terkait pajak dan retribusi belum disusun;
2. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan belum Optimal;
3. Pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kota Palu belum optimal.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

SUBAG HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

*Mohon agar informasi ini tidak disalah gunakan dan digunakan untuk merugikan kepentingan orang lain